

GUBERNUR KUKUHKAN ANGGOTA LEMBAGA OMBUDSMAN DIY

Aktualisasikan Sebagai Lembaga yang Dibutuhkan



Sri Sultan HB X saat mengukuhkan anggota Lembaga Ombudsman DIY di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan.

YOGYA (KR) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengukuhkan anggota Lembaga Ombudsman DIY, masa jabatan 2021-2024, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kamis (21/1). Keberadaan LOD DIY diharapkan dapat menjalankan visinya dengan baik dan mampu mengaktualisasikan diri sebagai lembaga terpercaya yang dibutuhkan masyarakat.

"LOD bukanlah lembaga pemberi sanksi tapi berfungsi sekedar pemberi pengaruh. Meskipun tidak memiliki instrumen pemaksa, pengaruh

Ombudsman tetap sangat kuat. Hal itu dikarenakan figur Ombudsman benar-benar dapat dipercaya akan integritas, kredibilitas, dan kapabilitas," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X saat mengukuhkan anggota Lembaga Ombudsman DIY Masa Jabatan Tahun 2021-2024 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kamis (21/1).

Penguatan anggota lembaga Ombudsman DIY ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 14/KEP/2021 tentang Penetapan Anggota Lembaga Ombudsman DIY Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

Sultan menegaskan, LOD bukanlah pengadilan tambahan atau pemutus perkara. LOD bertugas melakukan klarifikasi atas kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan se-

buah institusi, untuk membuat rekomendasi kepada institusi terkait di atasnya. Namun, karena rekomendasi yang dikeluarkan akan berdampak terhadap karir pejabat publik atau lembaga privat, maka kerja LOD sendiri hendaknya dilakukan secara cermat. Guna memperoleh kepercayaan publik, langkah-langkah LOD sebaiknya bersifat persuasif dan low profile, tetapi memiliki landasan prinsip yang kokoh.

"Setiap anggota harus membangun kinerja dengan pakta integritas dan etika, menjaga kekompakan internal, serta tetap menjaga netralitas dan objektivitas, tidak memihak kepada pengadu dan teradu. Sikap yang memiliki integritas menjadi modal utama agar terbangun trust dari masyarakat. Konsekuensi dari itu bagi

ketujuh anggota LOD DIY yang terpilih harus benar-benar bisa mengawal pelayanan publik. Khususnya aduan yang berdampak luas untuk cepat ditangani," paparnya.

Sementara Koordinator Pelaksana Harian Tim Seleksi Anggota Lembaga Ombudsman DIY Achiel Suyanto menyampaikan, dengan penguatan ini, dirinya berharap kinerja Ombudsman DIY semakin dipercaya oleh masyarakat. Sebab anggota Ombudsman DIY yang dilantik ini telah melalui uji publik sebelumnya.

"Teman-teman harus benar-benar konsisten, lalu akan aktif full bukan sebagai kerja sambilan. Kerja di Ombudsman DIY ini merupakan kerja pengabdian, tetapi jangan sebagai sambilan meskipun ada yang berprofesi sebagai dosen.

Mereka harus bekerja dengan penuh tanggung jawab supaya masyarakat bisa merasa diwakili," papar Achiel.

Ditambahkan, setelah anggota Ombudsman DIY ini dikukuhkan akan diberikan penyegaran terkait salah satu tugasnya sebagai penjamin keistimewaan. Kinerja 7 anggota Ombudsman DIY yang baru dilantik ini juga tetap akan menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di DIY selama masa pandemi Covid-19 ini.

"Adanya aturan kerja di rumah yang persentasenya 75 persen selama PTKM, jangan dijadikan penghambat kinerja pelayanan publik teman-teman Ombudsman DIY. Jangan sampai kinerja anggota Ombudsman DIY yang baru ini terpengaruh pandemi, hanya cara kerjanya saja yang diubah," imbuhnya. (Ria/Ira)-f

Pelaksanaan Asesmen Nasional Ditunda

YOGYA (KR) - Kemendikbud memutuskan menunda pelaksanaan Asesmen Nasional (AN). Sehingga pelaksanaan AN yang awalnya ditargetkan antara Maret-Agustus 2021, diputuskan mundur oada September-Oktober. Keputusan itu dilakukan agar protokol kesehatan, termasuk kebutuhan logistik dan infrastruktur di sekolah, terpenuhi dengan baik. Karena kepastian keamanan di sekolah penting agar siswa dan guru tidak terganggu kesehatannya.

"Keputusan untuk menunda pelaksanaan AN di satu sisi merupakan keputusan yang baik. Tentunya dengan memperhatikan masih tingginya penyebaran Covid-19 di masyarakat. Di sisi lain tentu saja ada konsekuensi yang harus disiapkan oleh sekolah terutama terkait dengan sampel siswa yang akan mengerjakan AN tersebut," kata Kepala Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI DIY sekaligus Kepala Dikmen Kulonprogo, Rudy Prakanto MEng di Yogyakarta, Kamis (21/1).

Dikatakan, AN dirancang awal untuk SD siswa kelas 5, SMP siswa kelas 8 sedangkan SMA/SMK siswa kelas 11 yang akan dijadikan sampel mengerjakan Asesmen Nasional. Tapi dengan adanya pengunduran itu, tentu perlu ada penentuan ulang sampel karena siswa yang sekarang ini sudah naik ke

kelas yang lebih tinggi. Jadi pengunduran AN sangat baik bila pemerintah pusat melakukan sosialisasi lebih masif lagi baik ke Pemda maupun sekolah.

Semua itu perlu dibarengi dengan dilengkapinya regulasi pelaksanaannya, sehingga lebih ada kepastian hukum dalam pelaksanaan Asesmen Nasional tersebut. baik itu di Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun sampai di tingkat Peraturan Daerah.

"Jangan sampai AN yang diniatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi kontraproduktif," ujar Rudy.

Lebih lanjut Rudy menambahkan, AN merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Perubahan mendasar pada AN adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. AN sekaligus dimaksudkan sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) yang sering dianggap berefek tidak menilai secara menyeluruh seluruh proses pendidikan di sekolah tetapi lebih kearah penilaian kognitif individu semata.

(Ria)-f

BERHARAP PTKM TIDAK DIPERPANJANG

Semua Pihak Diimbau Patuhi Aturan

YOGYA (KR) - Semua pihak baik dari kalangan usaha maupun masyarakat umum diimbau untuk mematuhi aturan untuk mengendalikan laju kasus Covid-19. Upaya tersebut sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat (PTKM) yang berakhir pada 25 Januari tidak diperpanjang.

Menurut Komandan Sat Pol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto, sejauh ini belum ada keputusan di tingkat DIY terkait perpanjangan PTKM. "Kita semua tentu berharap agar tidak diperpanjang. Tetapi mari kita juga patuhi aturan yang sudah dibuat agar kasusnya bisa terkendali," katanya, Kamis (21/1).

Selama sepekan lebih pengawasan pelaksanaan PTKM, Sat Pol PP Kota Yogyakarta mencatat ada puluhan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha maupun masyarakat umum. Sanksi

tersebut berupa peringatan lisan dan tertulis. Untuk pelaku usaha ada 22 kali teguran lisan dan enam kali teguran tertulis. Sedangkan masyarakat umum ada 68 orang yang ditegur secara lisan.

Agus menyebut, teguran lisan maupun tulis bagi pelaku usaha ialah dari kelompok warung-warung kecil karena masih menerima pembeli di atas pukul 19.00 WIB. "Warung itu tetap diperbolehkan buka di atas pukul 19.00 WIB tapi tidak untuk makan minum di tempat melainkan dibawa pulang. Ternyata masih ada yang kucing-kucingan. Seperti warung terkesan tutup tetapi di dalamnya menerima pembeli. Ada juga yang ketika petugas datang, meja kursinya digulung namun ketika petugas pergi dibuka lagi. Jangan seperti itu lah," imbaunya.

Sementara bagi masyarakat umum, masih banyak yang nongkro-

ng di berbagai lokasi hingga malam hari. Di antara mereka bahkan tidak menjaga jarak serta tidak menggunakan masker. Petugas pun terpaksa menghalau mereka sekaligus memberikan edukasi berupa teguran lisan.

Harapan agar PTKM tidak diperpanjang juga disuarakan dari kalangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ketua DPD PHRI Yogyakarta Deddy Pranowo Eryono, mengaku selama PTKM ini pelaku industri pariwisata harus menahan beban yang cukup berat. "Sudah ada sekitar 30 hotel yang benar-benar tutup. Kalau sampai nanti diperpanjang, ratusan hotel akan mati suri," katanya.

Deddy mengaku, kalangan hotel dan restoran selama masa pandemi ini sudah berupaya optimal agar bisa bangkit. Termasuk kerja kerasnya dalam mengantongi verifikasi protokol kesehatan. (Dhi)-f

PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MERASA DIMUDAHKAN

Program 'Cashback' Belanja Daring Dilanjutkan

YOGYA (KR) - Program pemberian *cashback* untuk belanja daring di pasar tradisional Kota Yogyakarta akan dilanjutkan pada tahun ini. Program tersebut merupakan kerja sama Pemkot Yogyakarta dengan salah satu platform atau start up online yakni Gojek.

Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Gunawan Nugroho Utomo, menjelaskan pihaknya tengah memformulasikan sistem yang akan digulirkan tahun ini. "Sementara ini masih dengan sistem yang lama. Namun apakah nanti ada pembaruan atau tetap sama, sedang kami bahas bersama Gojek," katanya, Kamis (21/1).

Melalui program tersebut pembeli di pasar tradisional lewat aplikasi Gojek, terutama pada menu Goshop, akan diberikan pengembalian Rp 10.000 untuk ongkos kirim. Tiga puluh pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta sudah bergabung sehingga bisa menjadi alternatif pilihan

berbelanja tanpa harus tatap muka.

Gunawan mengaku, program itu pertama kali digulirkan pada Oktober 2020 lalu. Tujuannya untuk meminimalisir pertemuan antara penjual di pasar tradisional dengan pembelinya selama masa pandemi. "Tahun lalu subsidi yang kami berikan tidak sampai Rp 20 juta namun perputaran uang yang terjadi cukup besar yakni mencapai Rp 147 juta. Untuk kuota tahun ini pasti lebih besar," tandasnya.

Berdasarkan hasil catatan transaksi tahun lalu, Pasar Kranggan menjadi tujuan paling tinggi oleh konsumen, disusul Pasar Pathuk, Pasar Demangan, Pasar Beringharjo dan Pasar Giwangan. Jenis dagangan yang paling banyak diburu ialah jajanan pasar, daun pisang, bumbu dapur, dan bunga. "Kami juga akan sosialisasikan lagi ke masyarakat. Mungkin masih banyak yang belum tahu jika belanja di pasar tradisional secara online

itu ada *cashback*. Bagi pedagang pun mereka harapannya tetap semangat dan percaya diri meski di tengah pandemi," urainya.

Sementara salah satu pedagang di Pasar Beringharjo Timur, Ida Chabibah, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. Setidaknya mampu memudahkan pedagang karena tidak perlu mendaftar. Hanya, bagi pedagang berusia lanjut dan tidak memiliki telepon pintar masih tergantung dari transaksi manual.

Menurut Ida, ketika kondisi bagus dalam sehari bisa mencapai 10 kali pembeli yang melalui online. Tetapi selama pandemi ini dirinya juga terbantu dengan sistem layanan kurir. "Untuk Goshop sangat membantu sekali. Namun pelanggan saya juga banyak yang pesan melalui pesan singkat kemudian barangnya saya titipkan kurir Gosend. Pembayarannya sistem transfer," katanya. (Dhi)-f

BERGANTUNG PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN

Pembangunan RTHP Masih Alami Penundaan

YOGYA (KR) - Rencana pembangunan ruang terbuka hijau publik (RTHP) pada tahun ini masih mengalami penundaan. Kegiatan itu pun tetap berpeluang dijalankan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah pada saat pembahasan APBD perubahan mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto, menyebut dalam APBD murni memang tidak dialokasikan anggaran untuk pembangunan RTHP. "Tetapi masih dimungkinkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan RTHP melalui anggaran perubahan," katanya, Kamis (21/1).

Pada tahun 2020, DLH Kota Yogyakarta sebenarnya berencana membangun RTHP di dua lokasi yaitu di Kelurahan Rejowinangun dan Purbayan. Tetapi rencana tersebut tidak dapat direalisasikan akibat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sugeng menjelaskan, saat ini di Kota Yogyakarta terdapat 49 RTHP yang tersebar di seluruh kecamatan. Kendati demi-

kian jumlahnya memang belum bisa merata sampai tiap kampung karena kepadatan permukiman penduduk.

"Penambahan RTHP itu didasarkan pada usulan masyarakat dan memperhatikan ketersediaan lahan di wilayah. Lahannya akan dibeli oleh pemerintah dan setelah dibangun RTHP pemanfaatannya dikembalikan ke masyarakat," urainya.

Sementara tahun lalu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melakukan pengadaan lahan di lima lokasi untuk kebutuhan ruang terbuka hijau. Masing-masing di Kelurahan Sosrosutan, Ngampilan, Pakuncen, Prenggan, dan Sosromenduran. Tahun ini juga akan ada pengadaan lahan untuk RTHP di wilayah Wirobrajan.

Dari pengadaan lahan itu selanjutnya ditindaklanjuti oleh DLH untuk dibangun RTHP. Sejumlah fasilitas yang disediakan pun dikomunikasikan dengan warga setempat. Antara lain berupa gasebo, taman, ruang bermain anak hingga sarana olahraga. Salah satu fungsinya

ialah untuk sarana interaksi sosial.

"Tahun lalu berbagai kampus juga melakukan penelitian terkait RTHP di Kota Yogyakarta. Selain sarana interaksi sosial juga sebagai upaya kelestarian lingkungan. Luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta baru mencapai 23 persen yang terdiri dari 15,4 persen privat dan 8,12 persen publik," papar Sugeng.

(Dhi)-f

MULIA
AUTHORIZED MONEY CHANGER
www.muliamoneychanger.co.id

PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID - 19

- GRAND INNA MALIOBORO HOTEL JL. MALIOBORO 60 YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB
- PLAZA AMBARUMOH LOWER GROUND
TELP : 433 1272
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB
- JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 5015000
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

BUKA SETIAP HARI :
SENIN S/D MINGGU

TANGGAL	21-Jan-21	
CURRENCIES	BELI	JUAL
USD	13.950	14.250
EURO	16.925	17.225
AUD	10.800	11.000
GBP	19.050	19.550
CHF	15.650	16.000
SGD	10.675	11.025
JPY	134,50	139,50
MYR	3.375	3.575
SAR	3.650	3.950
YUAN	2.075	2.225

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah
Menerima hampir semua mata uang asing

tiap JUMAT
Periode: 22 Januari 2021

RAMAH MURAH AMAN

ROSE BRAND
Rp 26.350
Rp 25.200

SUNLIGHT
Rp 14.640
Rp 13.115

LIFEBUOY
Rp 23.500

PEPSODENT
Rp 9.655

DISKON 20% DISKON 20%

SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU HARGA BELUM TERMASUK DISKON

BELANJA AMAN DI MIROTA KAMPUS
DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN

Wajib cuci tangan
Makai masker
cek suhu tubuh
Physical distancing

Mirota Kampus
RUMAH BELANJA TERPERCAYA

JL. JOGJA-SOLO KM. 7 BABARSARI YOGYAKARTA TELP. 0274 - 485288
JL. C. SIBANJUNTAK 75 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 591254
JL. MENTERI SUPENO NO. 38 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 386797
JL. PALAGAN TENARA PELAJAR NO. 31 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 869990
JL. GODEAN KM. 2,5 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 569312

mirota kampus @mirota_kampus www.mirotakampus.com mirota_nayani@yahoo.com